



PERENCANAAN STRATEGIS BUMDes DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN TERBINA JATISARI JENGGAWAH

Isnaini Azanil Isma

Politeknik Negeri Jember

Fadilla Dewi Fitriawati

Politeknik Negeri Jember

Samuel Rizal

Politeknik Negeri Jember

Alfin Dwi Yulianto

Politeknik Negeri Jember

Nur Febrianti

Politeknik Negeri Jember

Oryza Ardhiarisca

Politeknik Negeri Jember

Prillinaya Yudhistira

Politeknik Negeri Jember

Alamat: Jl. Mastrip PO. BOX 164 Jember, Kode POS 68101, Indonesia

Korespondensi penulis: isnainiazanil@gmail.com

Abstrak. This study aims to analyze the planning process of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Food Security TERBINA Jatisari in Jenggawah District and assess its conformity with planning stages and planning functions in public sector accounting. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews with five informants comprising the Planning Division, Advisor, Chief Director, Secretary, and Treasurer. Documentation was also used to support field findings related to the planning function. Data were analyzed interactively using the Miles and Huberman model, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The study finds that BUMDes plays a strategic role in driving the rural economy through planning, community empowerment, and financial governance. However, the research is limited to a single case study in one village, reducing generalizability. The study contributes to strengthening BUMDes reporting practices and improving administrative data management to support accountable village economic development.

Keywords: *Public Accounting Sector; Badan Usaha Milik Desa; Food Security; Planning.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketahanan Pangan TERBINA Jatisari di Kecamatan Jenggawah serta menilai kesesuaiannya dengan tahapan dan fungsi perencanaan dalam akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima informan yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Penasihat, Direktur Utama, Sekretaris, dan Bendahara. Dokumentasi juga digunakan untuk mendukung temuan lapangan terkait fungsi perencanaan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes berperan strategis dalam mendorong perekonomian desa melalui perencanaan program, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola keuangan. Penelitian ini terbatas pada satu studi kasus sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan praktik pelaporan BUMDes dan peningkatan ketertiban data administrasi untuk mendukung pembangunan ekonomi desa yang akuntabel.

Kata Kunci: *Akuntansi Sektor Publik; Badan Usaha Milik Desa; Ketahanan Pangan; Perencanaan.*

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 ayat (6) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes adalah usaha yang didirikan oleh pemerintah desa

dan masyarakat. Agar BUMDes dapat berjalan dengan baik sesuai perannya, maka perlu ada pengembangan. BUMDes adalah jawaban atas berbagai masalah yang ada di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan memacu perekonomian desa. Keberadaan BUMDes bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Dengan mampu mengelola potensi desa, BUMDes juga bisa menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

BUMDes TERBINA Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, menjadi salah satu BUMDes yang berfokus pada unit usaha ketahanan pangan. Unit ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam pengelolaan sumber daya desa, distribusi pangan lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya BUMDes ini masih menghadapi kendala pada aspek perencanaan dan penatausahaan keuangan, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia dan pencatatan keuangan tidak dilakukan secara sistematis sesuai prinsip akuntansi, sehingga menyulitkan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, data administrasi keuangan juga tidak lengkap karena terjadinya pergantian pengurus, menyebabkan sebagian dokumen tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan evaluasi kinerja unit usaha secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menjadi penting agar pengelolaan dana desa dan hasil usaha dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai BUMDes di Indonesia telah banyak dilakukan dengan fokus pada perencanaan, pengelolaan, serta Penatausahaan. Misalnya penelitian terdahulu oleh (Sari, 2022) di BUMDes Tawangargo Kabupaten Malang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan BUMDes dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan usaha. Namun, penelitian tersebut belum menyoroti secara mendalam penerapan siklus akuntansi sektor publik dalam penatausahaan keuangan BUMDes. Menurut (Yuna, Hamim, and Prayuda, 2025) dalam penelitian di Desa Baru Kabupaten Kampar berfokus pada strategi kerjasama tim perencanaan pembangunan desa dalam pengembangan program ketahanan pangan, namun dalam penelitian tersebut masih adanya kekurangan data dan informasi tentang keadaan potensi desa terkait program pemberdayaan masyarakat ekonomi produktif ketahanan pangan. Menurut (Ramadhan, 2025) pada penelitian di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan memberikan pendampingan kepada petani, menyediakan fasilitas penunjang, serta membantu dalam pengelolaan hasil pertanian, namun pada penelitian ini masih kurang optimal dalam program ketahanan pangan serta minimnya SDM. Menurut (Halawa et al. 2024) dalam penelitian di Desa Hilifalawu Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan mengetahui peran dan kendala serta upaya mengatasi kendala BUMDes dalam mengembangkan usaha ketahanan pangan, akan tetapi ada kendala BUMDes dalam mengembangkan usaha ketahanan pangan yaitu minimnya modal, kurangnya SDM, keterbatasan pemasaran, infrastruktur dan rendahnya pendidikan dan pelatihan. Menurut (Rahmayanti, Kusumawardhani, and Wardani, 2020) dalam penelitian di BUMDes di Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa fungsi perencanaan sebagai bagian dari siklus manajemen telah dilaksanakan oleh sebagian besar BUMDes di Kabupaten Cianjur. Pelaksanaan fungsi tercermin melalui keberadaan dokumen rencana strategis, visi dan misi organisasi, formulasi strategi, serta penyusunan perencanaan anggaran. Namun dalam penelitian ini masih adanya BUMDes yang belum memiliki dokumen perencanaan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas perencanaan dan pendampingan keberlanjutan dari pemerintah daerah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam beberapa aspek penting yaitu Penelitian ini dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Menteri

Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi salah satu studi awal yang secara langsung menilai bagaimana program ketahanan pangan diimplementasikan dalam sistem perencanaan dan penatausahaan keuangan BUMDes, khususnya pada BUMDes TERBINA Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Tidak hanya bersifat deskriptif, penelitian ini juga menggabungkan pendekatan pendampingan langsung dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes. Pendampingan tersebut menghasilkan peningkatan nyata dalam keteraturan penatausahaan dan kesesuaian laporan keuangan dengan siklus akuntansi sektor publik (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban). Pendekatan praktis ini belum pernah dilakukan dalam penelitian terdahulu.

Penelitian ini juga mengkaji unit usaha ketahanan pangan, yang merupakan bentuk implementasi program strategis nasional di bidang pangan dan kemandirian desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2022) yang berfokus pada perencanaan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan usaha.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes diperlukan perencanaan dan penatausahaan yang baik terutama dalam aspek keuangan dan pelaporan. Melalui penelitian ini penulis melakukan proses pendampingan penyusunan laporan keuangan BUMDes Terbina Jatisari sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas manajerial dan transparansi pengelolaan keuangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola BUMDes serta menjadi sarana penerapan ilmu akuntansi sektor publik dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian BUMDes Terbina Jatisari dapat semakin berdaya dalam mengelola aset desa, mengembangkan unit usaha ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Stakeholders

Teori stakeholders menjelaskan bahwa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kaitan dengan kegiatan dan hasil perusahaan disebut stakeholders. Sebaliknya, perusahaan juga bergantung pada pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai bisnisnya. Teori ini memiliki cara pandang yang komprehensif dan menyeluruh, serta para pendukung teori ini menangani semua pihak yang terlibat dengan cara yang adil, jujur, dan penuh empati (Tandiono et al. 2023).

Dalam penelitian ini, teori stakeholder menjadi dasar utama dalam memahami bagaimana fungsi perencanaan dan penatausahaan keuangan BUMDes Terbina Jatisari Jenggawah dijalankan untuk mewujudkan ketahanan pangan desa. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian tujuan internal, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Desa dalam Musyawarah Desa.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki beragam stakeholder, antara lain pemerintah desa, pengurus BUMDes, masyarakat, kelompok tani, dan konsumen produk pangan. Melalui proses perencanaan strategis dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, pengurus BUMDes berupaya membangun kepercayaan, transparansi, dan kolaborasi antar-stakeholder. Pendampingan dan pelaporan keuangan bukan hanya bentuk tanggung jawab administratif, tetapi

juga wujud komitmen moral kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan legitimasi sosial terhadap keberlangsungan BUMDes.

Dengan demikian, penerapan teori stakeholder dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan strategis BUMDes tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Semakin kuat koordinasi dan komunikasi antar-stakeholder, semakin efektif pula perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan desa. Oleh karena itu, teori stakeholder memberikan landasan konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana BUMDes dapat mewujudkan tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.

Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Berdasarkan rangkuman dari beberapa peneliti Tanur, Rahim, and Su'un (2022) perencanaan strategis untuk sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut

- (1) Membedakan antara rencana strategis dan rencana operasional.
Rencana strategis mencakup visi, misi, dan strategi (arah kebijakan). Sementara itu, rencana operasional mencakup program dan rencana tindakan (aksi).
- (2) Proses penyusunan rencana strategis melibatkan semua pihak yang terkait di masyarakat (dalam hal ini, pemerintah bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam perencanaan strategis).
- (3) Tidak semua masalah atau isu dipilih untuk diselesaikan.
Dalam tahapan perencanaan strategis, ditentukan oleh isu-isu yang dianggap paling penting atau fokus-fokus yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.
- (4) Evaluasi lingkungan internal dan eksternal dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pilihan strategi selalu diperbarui sejalan dengan peluang serta ancaman dari luar, dan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah proses menentukan langkah-langkah yang tepat di masa mendatang melalui serangkaian pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan kesatuan prosedur dalam perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, yang diimplementasikan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. (Sofyani and Prayudi, 2018).

Perencanaan pelayanan publik adalah usaha yang dilakukan dengan teratur, memilih opsi terbaik dari beberapa pilihan, memperhatikan sumber daya yang dimiliki, serta terus melakukan perbaikan agar bisa lebih baik di masa depan. Hal ini dilakukan agar pelayanan bisa lebih efektif dan efisien, serta dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Riani 2021).

Selanjutnya langkah-langkah Perencanaan menurut (Haryanto, 2007). Secara garis besar terdapat 4 (empat) langkah dasar perencanaan yang dapat dipakai untuk semua kegiatan perencanaan pada semua jenjang organisasi. Langkah-langkah tersebut, sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan

Proses perencanaan dimulai dengan menetapkan suatu tujuan apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Tanpa adanya tujuan yang jelas, sumber daya yang ada dalam organisasi cenderung akan menyebar terlalu luas.

2. Mengetahui posisi organisasi saat ini
Setelah tujuan ditentukan, para pemimpin perlu memahami dimana posisi organisasi saat ini dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana baru dapat dibuat setelah organisasi mengetahui keberadaannya saat ini
3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat menuju tujuan
Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, baik dari sumber internal maupun eksternal, yang diperkirakan dapat membantu atau menghalangi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan
Tahap terakhir dalam perencanaan adalah mengembangkan berbagai opsi atau langkah yang dapat diambil untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, mengevaluasi opsi-opsi ini, dan memilih yang dianggap paling tepat, sesuai, dan memuaskan.

Penelitian mengenai BUMDes di Indonesia telah banyak dilakukan dengan fokus perencanaan dan tata kelola yang baik. Misalnya, penelitian (Salampessy et al. 2023) menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan PADes melalui pelatihan dan pemberdayaan aparatur desa. Penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi agar pengelola BUMDes mampu berpikir kreatif dan menerapkan strategi yang efektif dalam mengelola unit usaha desa agar tidak sekadar berdiri secara administratif, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi.

Sementara itu, (Fernandes et al., 2023) menyoroti aspek Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan keuangan BUMDes di Minahasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab masih belum optimal, terutama dalam tahap penatausahaan dan pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang lebih terbuka serta peningkatan kapasitas SDM agar keuangan BUMDes lebih akuntabel.

Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi ini menetapkan bahwa BUMDes adalah entitas hukum yang didirikan oleh desa, atau oleh beberapa desa secara bersama-sama, untuk mengelola bisnis, memanfaatkan aset milik desa, mengembangkan investasi, serta menyediakan layanan ekonomi bagi masyarakat. Dengan status hukum tersebut, BUMDes kini mempunyai posisi yang diakui untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan beragam pihak, termasuk perusahaan swasta, koperasi, dan lembaga keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 angka (6) dijabarkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa BUMDes hadir bukan hanya sebagai keputusan administratif, melainkan sebagai hasil kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat yang berlandaskan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian desa.

Sementara itu, berbagai penelitian mengenai BUMDes di Indonesia telah dilakukan oleh Dewi & Yasa, (2025). BUMDes adalah badan usaha yang mencakup berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa, baik dalam bentuk pelayanan umum seperti pembiayaan air, listrik, sampah, dan lain sebagainya, maupun pelayanan pembangunan desa seperti pengembangan potensi desa seperti pengelolaan hutan, pertanian, dan perkebunan. Potensi tersebut memiliki kemungkinan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut Suleman et al., (2021), BUMDes adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk

memanfaatkan seluruh potensi alam, manusia, serta ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, BUMDes merupakan lembaga hukum yang didirikan oleh pemerintah desa bersama warga, untuk mengelola potensi lokal, memanfaatkan sumber daya desa, serta meningkatkan perekonomian desa. Lembaga ini berperan sebagai penggerak usaha, pemberdaya masyarakat, serta peningkat PADes. Selain itu, BUMDes memiliki landasan hukum yang kuat untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi mencapai kemandirian dan kesejahteraan desa.

Tujuan pembentukan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan warga desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Palupi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan pada BUMDes Ketahanan Pangan TERBINA Jatisari. Alasan menggunakan metode kualitatif ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan siklus akuntansi sektor publik pada Lembaga sektor publik yaitu dalam penelitian ini, Badan Usaha Milik Desa TERBINA Jatisari Kecamatan Jenggawah. Selain itu, desain kualitatif memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga menghindari bias dalam proses wawancara. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur yang dilakukan satu minggu sekali dengan lima informan utama, yaitu Bagian Perencanaan, Penasihat, Direktur Utama, Sekretaris, dan Bendahara. Data sekunder diperoleh melalui dokumen perencanaan, dokumen transaksi, serta laporan keuangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan BUMDes. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai fungsi perencanaan. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang digunakan untuk mengidentifikasi pola serta menjawab rumusan masalah terkait kesesuaian proses perencanaan dengan siklus akuntansi sektor publik.

No	Nama Informan	Jabatan	Informan Deskripsi BUMDes
1	TJ1	Penasihat	BUMDes Ketahanan Pangan Terbina Jatisari bergerak dalam 3 unit usaha yaitu unit usaha dagang berupa penjualan sembako, unit usaha jasa berupa layanan fotocopy dan unit usaha ketahanan pangan berlokasi di Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, dan BUMDes juga mendukung kebijakan terbaru Permendagri dengan melakukan peningkatan unit usaha ketahanan pangan masyarakat desa.

**PERENCANAAN STRATEGIS BUMDes DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN TERBINA JATISARI JENGGAWAH**

2	TJ2	Kepala Bagian Perencanaan Desa	Pembentukan unit usaha ketahanan pangan dilakukan melalui mekanisme perencanaan formal. Unit usaha ini telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun.
3	TJ3	Direktur BUMDes	BUMDes Jatisari melakukan pendistribusian produk di sekitar Desa Jatisari atau wilayah Kecamatan Jenggawah. Unit usaha perdagangan hasil pertanian, terutama komoditas pangan lokal seperti gabah, beras, dan kebutuhan pokok lainnya, dikelola melalui mekanisme pembelian langsung dari petani untuk kemudian disalurkan kembali kepada warga dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau.
4	TJ4	Sekretaris BUMDes	Bumdes Jatisari melakukan proses pencatatan setiap unit usaha melalui format excel sederhana. Proses inventarisasi dilakukan setiap 2 kali dalam setahun.
5	TJ5	Bendahara BUMDes	Pencatatan dilakukan setiap terjadinya transaksi, tetapi ada keterbatasan pemahaman dalam menyusun laporan keuangan BUMDes

Tabel 1. Informan Profile

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Terbina Jatisari berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman pengurus terkait tata kelola keuangan yang transparan dan sistematis. Sebelum pendampingan dilakukan, pengurus BUMDes menghadapi kendala berupa ketidakteraturan pencatatan transaksi, hilangnya data akibat pergantian pengurus, serta kurangnya pemahaman terhadap format pelaporan keuangan sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan proses pertanggungjawaban menjadi tidak tertata dan aliran data keuangan sulit ditelusuri.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara langsung, peneliti bersama pengurus melakukan penyusunan ulang dokumen administrasi dan memperkenalkan format pencatatan transaksi harian serta laporan keuangan bulanan yang mudah diterapkan sesuai karakteristik unit usaha BUMDes. Proses ini mendorong peningkatan kapasitas pengurus, terlihat dari kemampuan mereka mengidentifikasi transaksi, mencatat pemasukan dan pengeluaran, hingga menyusun laporan keuangan secara mandiri. Dampaknya, administrasi keuangan menjadi lebih terdokumentasi, informasi keuangan lebih mudah diakses, serta tersedia dasar data yang jelas untuk evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah desa maupun masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan (Maq et al., 2024) yang menegaskan bahwa pendampingan pelaporan keuangan BUMDes tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis pencatatan, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa.

Dalam konteks ini, pendampingan berfungsi sebagai proses pemberdayaan yang menguatkan aspek kelembagaan BUMDes melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini juga diperkuat oleh (Kania and Raesalat, 2019) yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan wadah pembelajaran masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal dengan prinsip transparansi dan kemandirian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang tertib menjadi sarana memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat, pemasok, dan pihak pengelola unit usaha. Dalam perspektif ini, pelaporan keuangan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap pihak yang berkepentingan. Dengan meningkatkan transparansi dan keterlacakan data, BUMDes mampu mempertahankan legitimasi sosial dan memperkuat kepercayaan publik, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan usaha desa. Dengan demikian, pendampingan penyusunan laporan keuangan dipahami sebagai proses penguatan nilai akuntabilitas dan pemberdayaan stakeholder dalam pengelolaan ekonomi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi diajukan untuk mendukung keberlanjutan BUMDes. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat regulasi internal serta menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur agar pelaksanaan BUMDes berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Ra'is and Rini, 2024). Kedua, pengurus BUMDes perlu meningkatkan kemampuan manajerial melalui pelatihan teknis seperti penyusunan laporan keuangan, pemasaran digital, dan strategi pengelolaan unit usaha berbasis potensi lokal (Khoirunnisa, 2025). Ketiga, penting bagi BUMDes untuk melakukan identifikasi potensi ekonomi desa secara menyeluruh guna merancang model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan (Taufiq Ismail, 2024). Keempat, kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan sektor swasta perlu ditingkatkan agar BUMDes mendapatkan pendampingan profesional dalam hal pemasaran, teknologi, dan akses modal. Terakhir, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan wilayah yang lebih luas disarankan untuk memperkuat generalisasi temuan dan menggali lebih dalam hubungan antar-dimensi peran BUMDes terhadap kewirausahaan pedesaan. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, BUMDes diharapkan dapat terus berkembang menjadi penggerak utama ekonomi desa, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan menjadi contoh praktik pembangunan berbasis kemandirian lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Luh Tu Sintia, and I Nyoman Putra Yasa. 2025. "Mengungkap Akuntabilitas Penerapan Digitalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 15 (1): 137–47.
- Fernandes, Dominikus, Primus Lake, Ernawati Daeng, Marthina Raga Lay, Belandina L Long, and Andreas Peni. 2023. "Sosialisasi Keberlanjutan BUMDes Pada Daerah Perbatasan (BUMDes Pala Opat Desa Tubu Kabupaten Timor Tengah Utara)." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1 (9): 1868–79.
- Halawa, Fiteriman, Fatiani Lase, Hendrikus O N Harefa, and Amstrong Harefa. 2024. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha

- Ketahanan Pangan Di Desa Hilifalawu Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (6): 717–23.
- HARYANTO, Haryanto. 2007. “Akuntansi Sektor Publik.” *Akuntansi Sektor Publik*, 1–251.
- Kania, Ikeu, and Riksa Raesalat. 2019. “Implementasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terhadap Manajemen BUMDesa Dalam Mewujudkan Efektifitas BUMDesa Di Kabupaten Garut.” *Jurnal Publik* 13 (1): 31–37.
- Khairunnisa. 2024. “Transformasi Manajerial BUMDesa Kemirigede Melalui Penyusunan Rencana Strategis Dan Model Bisnis Untuk Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Blitar” 6:294–302.
- Maq, Mumu Muzayyin, Sangrila Puspita Dewi, Muktar Muktar, Nining Suningrat, and Joni Wilson Sitopu. 2024. “Pendampingan Balai Desa Dalam Mengembangkan BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4 (5): 185–91.
- Palupi, Amalia Indah. 2020. “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Bumdes Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9 (2).
- Ra’is, Dekki Umamur, and Yeni Tata Rini. 2024. “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA: ANALISA TREN PENGELOLAAN DANA DESA 2016-2024: Transparency and Accountability in Village Fund Management: An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024.” *JADMENT: Journal of Administration and Development* 1 (2): 89–102.
- Rahmayanti, Krisna Puji, Dhian Kusumawardhani, and Afiati Indri Wardani. 2020. “Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat).” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 7 (1): 67–77.
- Ramadhan, Riyan. 2025. “Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.” *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial Dan Teknik* 1 (4): 114–26.
- Riani, Ni Ketut. 2021. “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1 (11): 2443–52.
- Salampessy, Maryam, Didik Suhariyanto, Romi Mesra, U L Qadri, Ade Putra Ode Amane, Amtai Alaslan, Meizi Fahrizal, Era Prestoroika, M Awaluddin, and Tesha Dwi Putri. 2023. *Kebijakan Publik*. CV. Gita Lentera.
- Sari, Rasti Nanda. 2022. “Analisis Fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).” *Dialektika Publik* 6 (2): 9–12.
- Sofyani, Hafiez, and Made Aristia Prayudi. 2018. “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja ‘A.’” *Jurnal Ilmiah Akutansi Dan Bisnis* 13 (1): 54–64.
- Sugiyono. 2013. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.” 274.

- Sugiyono, Prof Dr. 2017. “Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D.” *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung* 225 (87): 48–61.
- Suleman, Dede, Ida Zuniarti, Ratnawaty Marginingsih, Isnurrini Hidayat Susilowati, Imelda Sari, and Ety Nurhayaty. 2021. “Management Science Letters” 11:111–16. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.8.024>.
- Tandiono, Rosaline, Andalan Tri Ratnawati, Gusneli Gusneli, Ilham Ilham, Rita Martini, Ervina Waty, Hempry Putuhena, Mulyadi AR, and Erwina Krtika Devi. 2023. *TEORI AKUNTANSI: Konsep, Aplikasi, Dan Implikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tanur, Dahliana, Syamsuri Rahim, and Muhammad Su’un. 2022. “Implikasi Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran (RSPP) Serta Anggaran Berbasis Kinerja Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.” *Journal of Accounting and Finance (JAF)* 3 (1): 75–92.
- Yuna, Syarifah Erma, Sufian Hamim, and Rendi Prayuda. 2025. “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Pengembangan Program Ketahanan Pangan Di Desa Baru Kabupaten Kampar.” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11 (1): 142–66.